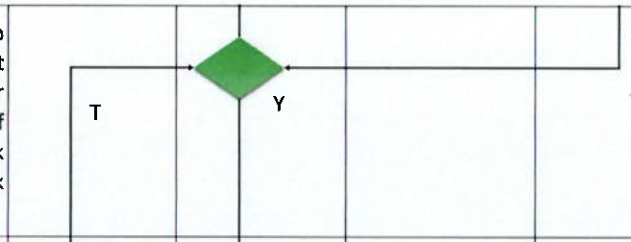
KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT BADAN USAHA

Nomor SOP	:	AHU-60.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	16 Desember 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	24 Februari 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	PEMBUKAAN BLOKIR PERSEKUTUAN PERDATA

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata 4 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami ketentuan peraturan mengenai Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata 2. Memahami ketentuan Persekutuan Perdata 3. Memahami akses SA-BU www.ahu.go.id 4. Menguasai tupoksi Direktorat Badan Usaha
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1 SOP Pesan Nama Persekutuan Perdata 2 SOP Pendaftaran Pendirian Persekutuan Perdata 3 SOP Pencatatan Pendaftaran Persekutuan Perdata 4 SOP Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Perdata 5 SOP Pencatatan Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Perdata 6 SOP Pendaftaran Pembubaran Persekutuan Perdata 7 SOP Pemblokiran Persekutuan Perdata 8 SOP Persuratan	1. Komputer dan kelengkapannya 2. Data Perkumpulan 3. Printer 4. Jaringan internet 5. Daftar persyaratan permohonan SBPKP 6. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan terkait 7. Buku Agenda/ Register
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Mengutamakan prinsip kehati-hatian	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN PERSEKUTUAN PERDATA

No	Aktivitas/ Kegiatan	Dirjen AHU	Direktur Badan Usaha	Ketua Kelompok Kerja Badan Usaha dan Badan Usaha Lainnya	Anggota Tim	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membaca, Mempelajari dan mendisposisikan permohonan Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata					Lembar disposisi, surat dan berkas Permohonan	5 hari	Disposisi	berkaitan dengan SOP Persuratan TU Pim
2	Memeriksa, Mempelajari dan mendisposisikan permohonan Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata					Lembar disposisi, surat dan berkas Permohonan	2 hari	Disposisi	berkaitan dengan SOP Persuratan TU Badan Usaha
3	Memeriksa, mempelajari, memberi petunjuk serta memberikan disposisi permohonan Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata					Lembar disposisi, surat dan berkas Permohonan	1 hari	Disposisi	
4	Memeriksa, meneliti kelengkapan dokumen dan membuat konsep Nota Dinas dan surat jawaban terkait Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata berdasarkan rekomendasi dan petunjuk Ketua Kelompok Kerja untuk mendapat persetujuan					Berkas Permohonan yang sudah didisposisi	10 hari	Konsep Nota Dinas dan surat jawaban terkait rekomendasi Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata	
5	Memeriksa, meneliti dan mempelajari konsep Nota Dinas dan surat jawaban terkait rekomendasi permohonan Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata serta membubuhi paraf pada Nota Dinas, jika tidak disetujui maka akan dikembalikan untuk diperbaiki			T Y		Konsep Nota Dinas dan surat jawaban terkait Rekomendasi terkait Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata	1 hari	Konsep Nota Dinas dan surat jawaban terkait rekomendasi Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata	
6	Mencatat konsep Nota Dinas terkait Pembukaan Blokir/ Penolakan Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata		T			Konsep Nota Dinas dan surat jawaban terkait Rekomendasi terkait Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata	1 hari	Konsep Nota Dinas dan surat jawaban terkait rekomendasi Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata	

7	Memeriksa, meneliti dan mempelajari konsep Nota Dinas dan surat jawaban terkait rekomendasi permohonan Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata serta membubuhi paraf pada Nota Dinas dan surat jawaban, jika tidak disetujui maka akan dikembalikan untuk diperbaiki					Konsep Nota Dinas dan surat jawaban terkait Rekomendasi terkait Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata	1 hari	Konsep Nota Dinas dan surat jawaban terkait rekomendasi Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata	berkaitan dengan SOP Persuratan TU Badan Usaha
8	Memberikan persetujuan/penolakan terhadap Nota Dinas Permohonan Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata, serta menandatangi surat jawaban pembukaan blokir, jika tidak disetujui maka akan dikembalikan untuk diperbaiki					Disposisi Hasil telaahan dan rekomendasi persetujuan/penolakan Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata	10 hari	Disposisi Hasil telaahan, rekomendasi persetujuan/penolakan dan surat jawaban Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata	berkaitan dengan SOP Persuratan TU Pim
9	Memberikan disposisi persetujuan/penolakan Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata					Disposisi persetujuan/penolakan dan surat jawaban Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata	1 hari	Disposisi persetujuan/ penolakan dan surat jawaban Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata	Berkaitan dengan SOP Persuratan TU Badan Usaha
10	Melakukan Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata dalam sistem Administrasi Badan Usaha					Disposisi persetujuan/penolakan dan surat jawaban Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata	1 hari	Disposisi persetujuan/ penolakan dan surat jawaban Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata	
11	Mencatat Konsep Surat Jawaban Pemberitahuan terkait Pembukaan Blokir/Penolakan Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata					Buku register pencatatan	2 jam	surat jawaban pemberitahuan Pembukaan Blokir/penolakan Pembukaan Blokir Persekutuan Perdata	